

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PERUMAHAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROPINSI PAPUA**

Agustinus Tridarsa Pasande¹, Muhlis Hafel², Yosephina Ohoiwutun³
Universitas Terbuka^{1,2}
Universitas Cenderawasih³
yossi_ohoiwutun@yahoo.co.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan perumahan di Mamberamo Tengah, yang mana faktor-faktor tersebut sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dilakukan langkah koreksi dan penelitian ini juga sebagai mediator bagi PNS Papua untuk mengetahui secara pasti dan komprehensif terkait manfaat rumah layak huni bagi keselamatan dan keamanan PNS Papua agar selalu sehat dan semangat dalam beraktivitas serta berproduktifitas. Data diolah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, pelaksanaan implementasi program kebijakan pelayanan perumahan bagi PNS oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemda Mamberamo Tengah. Dari aspek; a) Isi kebijakan; kebijakan UU No.1 /2011 kemudian dilanjutkan dengan membuat PKP, isi PKP 1) menunjukan Dinas Perkim memiliki kewenangan yang kuat mencakup penentuan alokasi rumah dinas dan bentuk rumah dinas. Context of Implementation. 1) program rumah mencakup a) Staff, Barak type 36. b) pejabat eselon 3 & 4, Barak type 42. c) pejabat eselon 2, rumah tunggal type 45. 2) Manfaat kebijakan, a) menghemat biaya rumah b) meningkatkan motivasi PSN dalam bekerja. c) kedisiplinan. d) keselamatan dan e) keamanan PNS. Faktor yang yang memengaruhi program kebijakan pelayanan perumahan bagi PNS oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kata Kunci : Pelayanan Perumahan, Program Kebijakan, Permukiman

ABSTRACT

This study aims to explore the factors that support and hinder the implementation of housing policies in Central Mamberamo, which factors are used as input for the Central Mamberamo Regency Government to take corrective steps and this study is also a mediator for Papuan civil servants to know for sure and comprehensively the benefits of livable houses for the safety and security of Papuan civil servants so that they are always healthy and enthusiastic in their activities and productivity. Data were processed using source triangulation techniques. The results of this study found that the implementation of the housing service policy program for civil servants by the Housing and Settlement Area Service of the Central Mamberamo Regional Government. From the aspects; a) Policy content; the policy of Law No. 1 / 2011 is then continued by making PKP, the contents of PKP 1) show that the Perkim Service has strong authority covering the determination of the allocation of official housing and the form of official housing. Context of Implementation. 1) housing program includes a) Staff, Barracks type 36. b) echelon 3 & 4 officials, Barracks type 42. c) echelon 2 officials, single house type 45. 2) Benefits of the policy, a) saving housing costs b) increasing PSN motivation in working. c) discipline. d) safety and e) security of civil servants. Factors that influence the housing service policy program for civil servants by the Housing and Settlement Area Service.

Keywords: Housing Services, Policy Programs, Settlements

PENDAHULUAN

Pegawai negeri sipil (PNS) di Mamberamo Tengah Provinsi Papua memegang peran krusial di suatu Negara yang telah diangkat dengan kompetensi dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan Negara. PNS berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya untuk mewujudkan segala sistem baik administrasi, hukum dan politik pada suatu negara. Selain sebagai instrument pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik yang berlaku, PNS juga berperan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali. Kesejahteraan, perumahan dan keselamatan pegawai negeri merupakan faktor penting dalam memastikan produktivitas dan moral mereka secara keseluruhan. Kendati demikian, program kebijakan rumah dinas yang di implementasikan di Mamberamo Tengah, masih belum cukup menampung para PNS yang membutuhkan rumah dinas di Mamberamo tengah. Terhitung sejak program kebijakan dilaksanakan tahun sejak dikeluarkannya aturannya tertuang dalam Permen No.40 /1994 tentang Rumah Negara sampai saat ini tahun 2024. Sekitar 9 orang PNS yang telah mendapatkan rumah dinas sementara, 8 orang PNS lainnya belum mendapatkan rumah dinas. Akibatnya, PNS Mamberamo tengah masih menempati rumah tidak layak huni.

PNS Mamberamo tengah masih menikmati rumah-rumah yang tidak layak huni. Rumah yang ditempati mayoritas PNS Mamberamo tengah, pada atap rumah yang masih terbuat dari tanah liat. Pada lantai rumah sendiri, mayoritas PNS Papua masih menggunakan lantai yang terbuat dari tanah yang dipadatkan kemudian dilapisi dengan jerami. Pada aspek rumah tempat tinggal, genteng berbahan mudah bocor serta lantai dan dinding dari papan serta lantai rumah dari tanah yang dipadatkan yang dilapisi jerami dapat memicu timbulnya berbagai jamur dalam ruangan rumah ketika musim penghujan, sehingga rumah dengan model bangunan dan bahan tradisional tersebut dapat menimbulkan penyakit. Sementara itu, lingkungan atau kawasan tempat tinggal yang dekat dengan hewan yang mereka ternak sendiri seperti babi sangat rentan menyebabkan timbulnya penyakit TBC di Mamberamo Tengah karena kerapnya kontak dengan hewan peliharaan seperti babi. Kondisi ini, semakin memperkuat bahwa rumah tempat tinggal dan lingkungan atau kawasan rumah tempat tinggal mayoritas PNS Mamberamo Tengah dalam kondisi yang tidak layak. Hal ini juga sebagai penghambat menurunkan penyakit TBC di Provinsi Papua. Dimana berdasar Dinkes Papua (2023) bahwa menurut laporan WHO dalam Global TBC Report Tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat kedua dunia sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak setelah India, jumlah kasus TBC tahun 2022 di Papua yang belum dihentikan adalah sebanyak 5.487 kasus, jumlah ini sangat fenomenal.

Permasalahan rumah tidak layak huni yang masih ditempati mayoritas PNS Mamberamo Tengah ini juga diperkuat dengan data yang dikutip peneliti dari Papua (2023) pada hari Rabu tanggal 28 september 2024, sebesar 100 % rumah PNS Papua masih terbuat dari Kayu/Papan dengan atap terbuat dari genteng sebesar 59,99% dan seng sebesar 38,98%. Sementara itu, lantai rumah PNS Papua 81,61% terbuat dari tanah yang dipadatkan dan dilapisi dengan jerami, sedangkan lantai dari keramik hanya sebesar 0,19%, lantai yang terbuat dari kayu atau papan sebesar 16,44% serta sebesar 0,78% terbuat dari semen dan sebesar 0,98% terbuat dari tanah. Konsep implementasi kebijakan sendiri menurut Grindle (1980) merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. dengan demikian, kebijakan public pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang

dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah kedalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Selanjutnya Marwiyah (2020) menekankan bahwa dibutuhkan suatu jaringan yang menghubungkan negara dengan aktor masyarakat untuk menyatu dalam proses kebijakan publik dari tahap perumusan kebijakan hingga implemementasi kebijakan agar tujuan kepentingan publik dapat tercapai. Hubungan ini disebutnya sebagai *Policy Networks*. Interaksi antara sejumlah departemen dan organisasi pemerintahan dengan organisasi masyarakat merupakan *policy networks* yang bersifat instrumental dalam proses kebijakan publik. Kekuatan *policy networks* atau jejaring kebijakan tergantung pada tingkat integrasi, kemapanan keanggotaan, sumber daya dan hubungan dengan public.

Perumahan secara konseptual menurut Sunarti (2019) adalah gabungan dari beberapa rumah, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Perumahan juga memiliki kesan bangunan yang dibangun secara formal dengan izin yang jelas. Beberapa perumahan terkadang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap yang dikelola oleh pemerintah maupun pengembang. Selaras dengan rumah, perumahan juga sebagai cerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan ataupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa, sehingga perumahan tidak hanya dilihat sebagai wadah fisik atau sekedar lindungan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan social. Rizki et al. (2022) mnejabarkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi model teori Gindle yang mana dalam model tersebut sangat komprehensif dalam memperjelas masalah, proses dan hasil penelitian ini. Model tersebut juga sangat sesuai dengan pemasalahan yang angkat dalam penelitian ini. Sehingga dalam model teori dan fokus penelitian sebagai *state of art* dalam penelitian ini. Menurut Pramono (2020) bahwa kelebihan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para actor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan perumahan di Mamberamo Tengah, yang mana faktor-faktor tersebut sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dilakukan langkah koreksi dan penelitian ini juga sebagai mediator bagi PNS Papua untuk mengetahui secara pasti dan komprehensif terkait manfaat rumah layak huni bagi keselamatan dan keamanan PNS Papua agar selalu sehat dan semangat dalam beraktivitas serta berproduktifitas. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pihak akademisi dan pemerintah serta masyarakat luas akan memiliki GAP wawasan yang dapat menimbulkan polekmik lantaran banyaknya perumahan PNS dari pemerintah yang tidak di huni di Mamberamo Tengah. Sesuai dengan pernyataan Tresiana & Duadji (2021) dalam bukunya bahwa tujuan penelitian implementasi kebijakan secara antologis dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan public tidak berhasil di implementasikan di suatu daerah tertentu. Upaya untuk memahami fenomena impementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja sebagai variable penjelas yang memunculkan faktor-faktor apa saja atau variable penjelas yang memunculkan fenomena implementasi tersebut mencangkup apa sebenarnya faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan fenomena implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pemilihan desain penelitian kualitatif didasarkan pada motivasi peneliti untuk mengungkap secara jelas proses dan faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan publik. Menurut Hasan et al. (2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekimtan, jalan danau bira, Kec. Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Periode tanggal 28 september 2024 sampai tanggal 15 november 2024.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang narasumber PNS Pemda yang belum mendapatkan rumah dinas, Papua kemudian 8 orang PNS yang sudah mendapatkan rumah dinas. 7 staff Perkim dan 9 staff ahli. Total narasumber berjumlah 28 orang. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis dan sumber data antara lain sumber data primer dalam penelitian ini data wawancara dan sumber data sekunder dalam penelitian ini jenisnya buku referensi dan jurnal penelitian terdahulu. Hardani et al. (2020) mengemukakan bahwa data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Instrumen penelitian dalam berbentuk panduan wawancara mengacu pada yang dikemukakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui metode: wawancara. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Observasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Hasan et al. (2022) bahwa wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Menurut Budiastuti (2018) observasi adalah pengamatan dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa.

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan alat bantu software N-Vivo. Suryani et al. (2020) menjelaskan bahwa penggunaan N-Vivo untuk menganalisis data kualitatif terdiri dari 1) Reduksi Data yakni Coding Data dan *Coding comparison* diagram. 2) Penyajian data (Data Display). 3) Penarikan Kesimpulan dan Keabsahan Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan implementasi program kebijakan pelayanan perumahan bagi PNS oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemda Mamberamo Tengah

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan menurut menurut Kasmad (2013), sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan itu mewakili kepentingan orang-orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan sasaran program. Suatu kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari kelompok sasaran dari. Suatu kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya kalau kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya, demikian pula sebaliknya.

Dominus wanimbo sebagai staff Perkim (wawancara 3 november 2024) mengemukakan bahwa *“Isi kebijakan dalam evaluasi perumahan dan kawasan permukiman mengacu pada kebijakan yang di amanatkan dalam UU No.1/ 2011 tentang PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman). Implementasi kebijakan ini*

diarahkan untuk pembangunan nasional dalam lingkup kesejahteraan staff dan pejabat yang berstatus PNS Pemda sebagai perpanjangan tangan dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur otonomi daerah untuk pembangunan kawasan dan pemukima. Secara keseluruhan isi dari kedua kebijakan ini untuk menjamin kesejahteraan PNS”

Dinas Perkim memiliki wewenang dalam menentukan pembangunan dan pengembangan perumahan sebagaimana tercantum dalam RP3KP yang disusun bupati, Karenanya, dalam system implemetasi kebijakannya, dinas Perkim melibatkan 9 orang ahli untuk memaksimalkan pembangunan rumah dinas berikut pemaparan narasumber.

Rendin Karoba sebagai staff Perkim Pemukim (wawancara 18 november 2024) memaparkan bahwa *“Jakstra PKP bentuk rumah dan kawasan yang tercantum di RP3KP ini melibatkan 9 tenaga ahli antara lain 1) tenaga ahli demografi yang menyiapkan profil kependudukan. 2) Ahli ekonomi pembangunan yang menyediakan tanah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dan pembangunan rumah . 3) ahli perencanaan wilayah dan kota yang membuat rencana perumahan dan permukiman serta analisis dan proyeksi kebutuhan perumahan dan permukiman” . 4) ahli perumahan dan kawasan permukiman yang bertugas untuk menyusun profil PKP daerah dan analisis PKP seperti ketersediaan lahan dan kebutuhan perumahan. 5) ahli pemetaan yang bertugas untuk menyediakan peta dasar dan menyediakan peta tematik yang terdiri dari nilai lahan, tutupan jaringan prasarana, sebaran sarana, dll. 6) ahli Infrastruktur yakni menyediakan profil kondisi infrastruktur dan kriteria infrastruktur (KPI), proyeksi kebutuhan infrastruktur dan program infrastruktur. 7) ahli hukum yang membantu dalam legalisasi. 8) ahli lingkungan untuk menentukan lokasi-lokasi yang sesuai untuk perumahan seperti tidak rawan bencana, kesediaan air bersih dan ketersediaan listrik serta tempat pembuangan sampah dan 9) ahli kebijakan untuk analisis kebijakan makro di bidang PKP”*

Alokasi letak rumah mencakup kawasan dan pemukiman yang akan dibangun di tentukan oleh dinas Perkimtan. Penentuan alokasi rumah dinas atau keputusan dari Perkimtan inilah suatu fungsi yang sangat krusial yang dipegang oleh dinas Perkimtan. Penentuan Alokasi ini berdasar pada kelayakan tempat tinggal

Rully Pongsikabe sebagai staff Perkim (wawancara 27 november 2024) menegaskan bahwa *“Lokasi pembangunan ini ditentukan oleh kita setelah menganalisis kawasan-kawasan yang cocok dibangun untuk perumahan dinas, berdasarkan RP3KP evaluasi kita lakukan untuk memantau lokasi yang akan dijadikan pemukiman perumahan dinas bagi PNS. RP3KP bukan hanya sebagai arahan untuk lokasi melainkan juga model bangunan yang akan di bangun seperti rumah dinas unruk pejabat yang berbeda dengan PNS”*

Setelah alokasi kawasan dan pemukiman PNS dan pejabat ditentukan. Dilanjutkan dengan membuat suatu analisis terkait kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang daerah untuk menentukan kesanggupan mendirikan rumah dinas di kawasan pemukiman yang tercantum di RP3KP.

Tetius Yikwa sebagai ahli perumahan dan kawasan permukiman (wawancara 9 Januari 2025) menambahkan bahwa *“Setelah rangkaian analisis dilakukan mulai dari alokasi kawasan dan pemukiman alokasi rumah sesuai dengan tingkat strategisnya serta bentuk rumah. Kita membuat kebijakan yang berisi pengaturan yang sangat spesifik, ini mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi kawasan dan pemukiman bagi PNS dan pejabat dengan mengacu pada kebijakan pembangunan daerah. visi dan misi dlam kebijakan ini menggambarkan kondisi PKP yang diharapkan tercapai pada akhir tahun perencanaan yang umumnya diberi waktu selama 20 tahun ke depan. Kebijakan ini mengatur dan mengarahkan program pembangunan daerah untuk mencapai visi dan*

misi daerah. Kebijakan ini dibuat berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang daerah”

Undang-undang dibuat untuk mematenkan implementasi kebijakan atau disebut instrumen kebijakan agar dalam pembangunannya tidak ada masalah seperti tidak ada izin masyarakat, dll. Lebih lanjut lagi, rumah dinas Perkim sama sekali bukanlah lembaga yang memiliki wewenang untuk pengadaan rumah dinas, Perkim adalah lembaga perpanjangan tangan bupati dalam merealisasikan kebijakan bupati untuk pembangunan nasional searah dengan visi dan misi bupati, berikut kutipan wawancara dengan narasumber.

Manuel sebagai Karoba ahli pemetaan (wawancara 13 Januari 2025) mengungkapkan bahwa *“Dinas Pekim sama sekali bukan organisasi yang memiliki wewenang untuk pengadaan rumah dinas, karena pengadaan tersebut adalah Pemda atau bupati, pengadaan rumah dinas sendiri dengan membuat surat pengajuan rumah dinas oleh pemerintah daerah (pemda) dapat dilakukan dengan cara kontes atau melalui prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Setelah pengajuan diterima maka rumah dinas dapat dibangun, pengadaan rumah dinas dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan membangun rumah baru di atas tanah milik satuan kerja pemerintah atau dengan cara membeli rumah baru beserta tanahnya.*

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahman et al. (2023) bahwa isi kebijakan harus memuat terkait kepentingan kelompok sasaran. Isi kebijakan juga harus memuat jenis manfaat yang akan diterima oleh target kebijakan. Derajat perubahan yang mennerangkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai. Letak pengambilan keputusan. Implementator siaman, kebijakan juga berisi terkait orang-orang yang terlibat dalam proses implementasi. Serta sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Silvy et al. (2024) bahwa dalam keberhasilan suatu program dapat dilihat dengan 2 hal yaitu proses kebijakan, pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan mengarah pada pelaksanaan kebijakannya. Dalam mencapai tujuan yang akan dicapai harus ada impact atau efeknya serta perubahan baik secara ndividu maupun kolektif dalam masyarakat. besarnya perubahan dan penerimaan kelompok sasaran. Sejauh mana kebijakan diimplementasikan, termasuk isi (content of policy) dan konteks pelaksanaannya (context of implementation), juga mempengaruhi seberapa besar keberhasilan kebijakan public.

Context of Implementation

Proses pengimplementasian suatu kebijakan menurut Pramono (2020) dipengaruhi oleh dua unsur yaitu; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Dominus wanimbo sebagai staff Perkim (wawancara 3 november 2024) mengemukakan bahwa *‘Terdapat tiga program rumah dinas yang termuat dalam SOP RP3KP, antara lain 1) Program rumah dinas PNS di Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari barak pegawai utk staf dengan Type 36 yang dipisahkan oleh satu dinding, atau 1 deret terdapat 5 rumah. Pondasi titik semua terbuat dari kayu pada atap sendiri terbuat dari seng”. 2) program rumah pejabat eselon 3 & 4 di Kabupaten Mamberamo Tengah bentuknya type 42, dalam 1 deret terdiri dari dua rumah untuk pondasi titik, dinding, lantai kayu, sementara itu atapnya terbuat dari seng. 3) program rumah pejabat rumah dinas eselon 2 type 45 rumah tunggal pada pondasi titik, dinding, lantai kayu. Iya program inilah output kinerja dari dinas Perkim, dalam program rumah dinas dibedakan bentuk rumah berdasar pada jabatan yang diemban.*

Pembangunan rumah dinas di Mamberamo Tengah berdasar pada kecukupan dana atau APBD dari Pemda selain itu disesuaikan dengan budaya masyarakat Mamberamo Tengah yang terbiasa dengan rumah dari bahan dasar papan kemudian dinas Perkim merancang dengan ventilasi dan jendela yang cukup karena atap dirancang menggunakan seng menyesuaikan dengan iklim tropis di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Epina Edambae sebagai ahli ekonomi pembangunan (wawancara 19 desember 2024) menyampaikan bahwa *“Bentuk rumah yang dibangun ini berdasarkan pada kecukupan dana di Mamberamo Tengah yang minim, dimana dari pondasi titik, dinding dan lantai terbuat dari kayu dan atap dari seng disebabkan harga semen yang sangat mahal di Kabupaten Mamberamo Tengah, ketidakcukupan biaya Pemda inilah sebagai faktor rumah dinas di sini berbeda dengan rumah dinas di luar daerah. Namun, untungnya sesuai dengan budaya masyarakat Mamberamo tengah yang memang menyukai papan sebagai bahan pembuatan rumah karena di kawasan tropis disini sangat akrab dengan iklim panas, sementara itu seng sebagai atap yang sama sekali tidak bisa menyerap panas, sehingga dengan menggunakan papan sangat sejuk, karena struktur serat papannya memiliki kemampuan untuk mengalirkan udara dari kedua arah, namun harus didudung dengan ventilasi dan jendela yang cukup dan mencegah pemanasan di dalam rumah”*.

Anggara (2013) memaparkan bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan; bentuk kebijakan yang memuat antara lain kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan, dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada, dan mengoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi.

Leo Yulianto Zakaria, staff PNS Pemda yang mendapatkan rumah dinas (wawancara 1 Februari 2025) membeberkan bahwa *“rumah dinas cukup layak sejauh ini terasa sangat sejuk ketika siang hari dengan sirkulasi udara yang cukup, papan yang digunakan sangat tebal dan bagus kualitasnya, intinya rumah yang diberikan sangat layak dan menjamin kesehatan karena adanya ventilasi udara yang cukup”*

Keberhasilan kebijakan atau program menurut Kaharudin et al. (2024) dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.

Nius Payokwa, staff PNS Pemda yang mendapatkan rumah dinas (wawancara 25 Februari 2025) membeberkan bahwa *“manfaat rumah dinas tentunya untuk mengirit biaya-biaya perumahan, terutama bagi PNS yang dipindahtugaskan dari kota Jayapura ke Kabupaten Mamberamo Tengah. Rumah dinas ini juga merupakan suatu motivasi untuk PNS dan pejabat Mamberamo tengah agar meningkatkan kinerja mereka”*

Senada dengan keterangan tersebut, narasumber berbeda yang diwawancara peneliti juga mengungkapkan keterangan yang sama, berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

Gerard Morin, staff PNS Pemda yang mendapatkan rumah dinas (wawancara 26 Februari 2025) menambahkan bahwa *“rumah dinas sama sekali membantu kita agar menghemat biaya rumah, kita tidak perlu membeli rumah dan atau menyewa rumah*

apalagi mengontrak di kos-kosan, rumah dinas meningkatkan motivasi kita dalam bekerja. Fasilitas rumah dinas ini sangat menunjang kinerja kita juga dalam bekerja karena dengan adanya rumah dinas yang berdekatan dengan kantor memudahkan kita dalam ke kantor tepat waktu hal ini meningkatkan komitmen kita yang tinggi untuk bekerja di kantor”””

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sahi et al. (2023) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan berdasar pada ; 1) keluaran kebijakan (keputusan), dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru. 2) Kepatuhan kelompok sasaran, merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna untuk menggunakan kebijakan berdasar SOP. 3) Dampak nyata kebijakan. 4) Persepsi terhadap dampak yaitu penilaian atau perubahan yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung program tersebut.

Faktor-faktor pendukung implementasi program kebijakan pelayanan perumahan bagi PNS oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemda Mamberamo Tengah Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan public menurut Marwiyah (2022) adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu system yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.

Dominus wanimbo sebagai staff Perkim (wawancara 3 november 2024) mengemukakan bahwa *“Model komunikasi ini formal bentuknya tulisan karena bersumber dari kebijakan bupati. Komunikasi ini sudah dimulai dari tahap pendefinisian masalah perumahan dinas untuk PNS di Mamberamo tengah. Pada tahap mendefinisikan masalah ini, dinas perkim melaksanakan instruksi dari bupati untuk menyediakan kawasan dan pemukiman untuk staff dan pejabat yang berstatus PNS. Adapun pembangunan tersebut disebabkan karena adanya masalah staff dan pejabat berstatus PNS dipindahtugaskan ke Kabupaten Mamberamo Tengah yang membutuhkan rumah layak huni yang berlokasi di dekat kantor dan pusat perbelanjaan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mereka ketika berdinis karena profil wilayah mereka yang rentan keamanan akibat KKB.*

Komunikasi yang dilakukan secara efektif disampaikan Arafat (2023) , sebagai komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan merupakan faktor kunci. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan berkelanjutan dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, membangun kepercayaan, dan mengatasi perbedaan pemahaman atau konflik yang mungkin timbul.

Theopilus melamar sebagai staff Perkim (wawancara 9 november 2024) membeberkan bahwa *“Informasi yang disampaikan secara tulisan dan formal melalui surat untuk pelaku kebijakan antara lain terkait perencanaan dan program rumah dinas yakni 1) program rumah dinas PNS di Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari barak pegawai utk staf. 2) program rumah pejabat eselon 3 & 4 di Kabupaten Mamberamo Tengah bentuknya type 42. 3) program rumah pejabat rumah dinas eselon 2 type 45 rumah tunggal”*

Ditinjau dari segi *“Context”* Subianto (2020) memaparkan bahwa suatu kebijakan, maka pertama-tama harus diperhitungkan mengenai *“power structure”*, serta kelompok

kepentingan yang merupakan “stakeholder” dalam suatu kebijakan, baik dalam arti dukungan maupun dalam arti penolakan terhadap suatu kebijakan. Dukungan elite politik atau penolakan birokrasi tingkat nasional, regional atau lokal mempunyai pengaruh terhadap terhadap kemungkinan berhasilnya suatu program. Penilaian mengenai “power capabilities” dari para aktor yang terlibat dalam proses implementasi, serta sifat dan hakekat kepekaan suatu organisasi serta keberadaan lembaga pemerintah turut menentukan kemungkinan berhasilnya suatu kebijakan.

Piter Penggu sebagai staff Perkim (wawancara 11 november 2024) menerangkan bahwa *“Setelah mengirimkan informasi dengan menggunakan surat, kemudian komunikasi selanjutnya dilakukan secara lisan dan sifatnya formal yakni melalui rapat. Dalam tahapan ini disebut dengan tindakan dalam komunikasi dimana, dinas perkim langsung mendatangi pimpinan dinas setempat dengan staff ahli perumahan dan kawasan permukiman dan anggota DPR untuk bersama-sama membahas terkait rumah dinas sekaligus melihat kawasan yang di pilih untuk dibangun atau meremajakan rumah dinas”*

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa di dinas perkim menggunakan manajemen komunikasi yang terdiri dari empat tahapan. Selain itu bentuk komunikasi dilakukan secara formal antara lain komunikasi mendefinisikan masalah dilakukan secara tulisan melalui surat edaran bupati yang berisikan instruksi pembangunan rumah dinas dan surat perencanaan dan pemograman yang dikirimkan pada pelaku kebijakan atau dinas terkait yang membutuhkan rumah dinas. Kemudian komunikasi secara lisan dalam tindakan dan komunikasi untuk evaluasi perencanaan yang dilakukan melalui rapat dengan mendatangi kantor dinas pelaku kebijakan dan mendatangi langsung kawasan atau lokasi yang akan dibangun rumah dinas.

Sumber daya

Suksesnya pelaksanaan kebijakan menurut Tahir (2014), tidak lepas dari adanya kontribusi konkrit dari implementor kebijakan, seperti keahlian sumber daya manusia yang sangat memadai di lingkungan pemerintah, sumberdaya lainnya termasuk sarana dan prasarana sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Alamsyah (2016) bahwa sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Yatam Jikwa tenaga ahli demografi (wawancara 13 desember 2024) menyatakan bahwa *“kita sebagai ahli demografi output pekerjaan saya adalah dokumen terkait keadaan demografi rumah dinas, waktu penyelesaian pekerjaan 5 bulan. Saya sangat paham terkait analisis demografi dalam hal analisis jumlah, komposisi, dan distribusi staff dan pejabat yang dipindahtugaskan ke Mamberamo Tengah sehingga membutuhkan rumah dinas serta memproyeksikan pertumbuhan dan mengestimasi staff dan pejabat PNS yang dipindahtugaskan, waktu penyelesaian pekerjaan 5 bulan”*

Terkait fasilitas, di Perkim Mamberamo Tengah para staff ahli juga dilengkapi fasilitas memadai seperti kendaraan dinas, berikut pemaparan peneliti.

Jody M. Pegawak sebagai ahli kebijakan (wawancara 23 Januari 2025) mengatakan bahwa *“fasilitas disiapkan seperti kendaraan dinas, ini dibutuhkan sekali terutama untuk turun di lokasi tempat dibangunnya rumah dinas berikut pemukimannya. Jadi seperti diadakannya tindakan dan evaluasi untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang rumah yang dibangun itu kan kita harus kunjungi lokasinya dengan adanya mobil dinas kita sangat terbantu, kendaraan dinas ini membantu kami untuk menghemat biaya dimana, biaya dalam penggunaannya dikeluarkan oleh”*

Pendapat yang sama dikemukakan narasumber dalam penelitian ini, berikut kutipan wawancaranya.

Piter Penggu sebagai staff Perkim (wawancara 11 november 2024) menerangkan bahwa *“penggunaan fasilitas leptop sangat bermanfaat bagi kita apalagi pekerjaan kita kebanyakan terkait analisis data, membuat estimasi dan mengolah dalam bentuk dokumen serta laporan. Leptop memiliki kemampuan itu sendiri yang bermanfaat untuk menunjang kelancaran pekerjaan”*

Berdasarkan hasil wawancara maka di temukan bahwa ke -9 staff ahli memahami tugas dan fungsinya, sementara itu waktu penyelesaian pekerjaan diselesaikan dengan rata-rata 5 bulan, lebih cepat dari waktu penyelesaian yang di isyaratkan yakni 6 bulan. Ini artinya secara output dengan target waktu kerja tercapai atau para staff ahli dinas Perkim Mamberamo Tengah berkinerja tinggi. Namun masih adanya staff dan pejabat yang belum mendapatkan rumah dinas disebabkan karena tidak adanya dana dari Pemda atau APBD.

Sumber daya lainnya yakni berbentuk fasilitas berupa mobil dinas untuk membantu dalam meninjau lokasi yang akan dibangun rumah dinas, menghadiri rapat dan melakukan tindakan lapangan serta evaluasi di lapangan. Selain itu juga didukung leptop untuk menganalisis data, menyimpan data dan mengolah data kemudian dibuat dalam bentuk dokumen dan laporan penting untuk menunjang pekerjaan.

Sistem Birokrasi

Prinsip kejelasan birokrasi juga memiliki beberapa upaya dalam’menjamin birokrasi yaitu; pada birokrasi tidak terdapat tumpang tindih dan duplikasi dengan arti bahwa satu fungsi yang diselenggarakan bukan hanya terfokus pada satu instansi namun lebih dari satu, tidak terdapat adanya fungsi yang terabaikan karena tidak jelas kedudukannya dan berusaha menghilangkan persepsi banyak orang adanya fungsi yang kurang penting dalam suatu instansi. (Bormasa, 2022)

Debora Wanimbo sebagai staff Perkim Pemukim (wawancara 13 november 2024) *“struktur organisasi disini searah dengan visi dan misi Perkimtan yakni tersedianya lahan, kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni, ini juga searah dengan visi dan misi bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga dalam struktur organisasi memiliki para staff yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya searah dengan urusan pemukiman dan perumahan dengan pembagian peran yang sangat jelas”*

Aromatica & Sudrajat (2021) memaparkan bahwa kegiatan pembuatan struktur organisasi harus disesuaikan dengan tujuan organisasi. Artinya semua struktur yang dibuat dalam organisasi adalah untuk menjawab tujuan organisasi. Pada organisasi public sebagai salah satu organisasi publik, tujuan tersebut termuat dalam visi organisasi public dan searah dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Theopilus melamar sebagai staff Perkim (wawancara 9 november 2024) membeberkan bahwa *“pembagian kerja yang sangat jelas ini untuk menghindari tumpang tindih dalam mengemban tugas dan tanggungjawab, adanya pembagian kerja ini bermanfaat untuk pimpinan agar dapat mengukur siapa mengerjakan apa dan bagaimana hasil yang dicapai. Dengan demikian penetapan sstruktur ini telah mencerminkan pembagian kerja yang jelas dalam organisasi”*

Gagasan Jaelani (2021) dalam bukunya bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak lain dalam suatu organisasi memerlukan wadah yang jelas agar dalam pelaksanaannya dapat dikontrol dan dievaluasi hasilnya. Dalam rangka pembagian tugas dan control inilah penting dibuat struktur organisasi. Struktur organisasi diciptakan guna memudahkan dalam membangun kerja sama serta koordinasi dalam melaksanakan tugas. Kerjasama dan koordinasi penting guna menjaga agar tujuan dan

sasaran dapat dicapai. Syarat utama dalam struktur organisasi adalah : pembagian kerja dan mengkoordinasikan kegiatan kerja, pembagian kerja yang tepat akan menciptakan produktifitas yang baik bagi organisasi. Produktifitas yang baik harus diimbangi dengan koordinasi yang baik perlu agar kontinuitas dapat dijaga.

Epina Edambae sebagai ahli ekonomi pembangunan (wawancara 12 desember 2024) menyampaikan bahwa *“selanjutnya arah koordiansi adalah dari atas kebawah atau komunikasi dalam bentuk instruksi, perintah dan keputusan dari pimpinan kemudian disampaikan pada bawahan, adanya pembagian tugas yang jelas sangat membantu dalam menajalankan tugas. Tidak ada masalah yang berarti terkait saran, dll karena pekerjaan berdsar tugas, fungsi dan keahlian masing-masing”*

Arah komunikasi dari atas kebawah menurut Siregar et al. (2021) dinamakan sistem *downward communication*. Sistem ini, komunikasi berasal dari pimpinan kepada bawahannya. Fungsi dari komunikasi ini adalah supaya para pimpinan lebih mudah dalam memberi komando dan arahan kepada para bawahan. Tujuan pimpinan yang menggunakan jalur komunikasi ini yaitu mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui lisan ataupun tertulis.

Yanus Pagawak sebagai ahli perencanaan wilayah dan kota (wawancara 31 desember 2024) menerangkan bahwa *“komunikasi dari atas ke bawah yakni diberikan instruksi, pengarahan, dan pengontrolan kepada bawahan. Pimpinan yang menyampaikan kebijakan, peraturan, prosedur, program, dan sasaran kerja untuk dilaksanakan oleh bawahan, namun disini sudah ada pembagian tugas jadi tidak ada keluhan yang berarti karena pekerjaan dilaksanakan sesuai keahlian masing-masing”*

Bentuk bagan struktur organisasi yang baik menurut Adnan et al. (2013) adalah bagan berbentuk piramida. Bagan organisasi berbentuk piramida umunya disebut bagan organisasi hierarkis. Bagain ini dengan jenis struktur organisasi yang paling umum rantai komando berjalan dari atas yakni dari pimpinan ke staff dimana setiap staff memiliki seorang pimpinan. Struktur organisais yang menggunakan bagan ini umumnya ramping dengan hubungan hirarki, yaitu hubungan antara satuan organisasi atasan dengan satuan organisai bawahan yang berupa pemberian perintah dan tanggung jawab.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Komara (2017) bahwa komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keberhasilan implementasi program rumah. Hasil penelitian ini juga sejalan yang dikemukakan Muhtadi (2020) dalam hasil penelitiannya bahwa program perumahan diselesaikan tepat waktu disebabkan karena adanya dukungan sumber daya manusia dari pelaksana program. Kaahlian yang dimiliki pelaksana program membantu mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai keberhasilan program. Selain itu juga, sesuai dengan hasil penelitian Khusufmawati et al. (2021) bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini selain berupa tenaga kerja dan keahlian juga sarana seperti kendaraan dinas. Kendaraan dinas operasional dikatakan sebagai salah satu sarana penunjang yang penting dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian pemanfaatan kendaraan dinas yang merupakan barang milik daerah benar-benar akan menghemat biaya dalam melaksanakan tugas.

SIMPULAN

Dari aspek; a) Isi kebijakan; kebijakan UU No.1 /2011 kemudian dilanjutkan dengan membuat PKP, isi PKP 1) menunjukan Dinas Perkim memiliki kewenangan yang kuat mencangkup penentuan alokasi rumah dinas dan bentuk rumah dinas. 2) Dinas Perkim memiliki kemampuan yang kuat mencangkup Jakstra PKP berpedoman pada SOP. 3) Dinas

Perkim memiliki komitmen yang kuat mencangkup. a) rumah dinas memenuhi standart kelayakan terdiri dari standart kesehatan dan standart keamanan. b) Lingkungan rumah standart kelayakan mencangkup terfasilitasi air bersih dan tempat pembuangan sampah. c) alokasi rumah dinas berdasar tingkat strategis dari jarak tempuh dengan kantor dan kawasan perdagangan. 3) tenaga ahli mencangkup tenaga ahli lengkap. 4) Instrumen kebijakan mencangkup Undang-undang . 5). Membuat laporan terkait visi dan misi, biaya, kekurangan,kelemahan, peluang kekuatan serta jangka waktu penyelesaian proyek. b) *Context of Implementation*. 1) program rumah mencangkup a) Staff, Barak type 36. b) pejabat eselon 3 & 4, Barak type 42. c) pejabat eselon 2, rumah tunggal type 45. 2) Manfaat kebijakan, a) menghemat biaya rumah b) meningkatkan motivasi PSN dalam bekerja. c) kedisiplinan. d) keselamatan dan e) keamanan PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M., Hamim, & Sufian. (2013). *Organisasi Dan Manajemen*. Trussmedia Grafika.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik*. Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Aromatica, D., & Sudrajat, A. R. (2021). *Teori Organisasi Konsep, Struktur & Aplikasi*. Cv. Amerta Media.
- Bormasa, M. F. (2022). *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. Penerbit Cv. Pena Persada.
- Budiastuti, D. (2018). *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Dengan Analisis Dengan Nvivo, Spss Dan Amos*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru (Anggota Ikapi).
- Grindle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, & Mattunruang, A. A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group.
- Jaelani. (2021). *Teori Organisasi*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal Moderat*, 7(4), 713–724. <https://Ojs.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Modrat>
- Komara, D. M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Rumah Pintar Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 1–12.
- Marwiyah. (2022). *Kebijakan Publik*. Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik.
- Marwiyah, S. (2020). *Imu Administrasi Negara*. Universitas Penca Negara.
- Muhtadi, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Tangerang. *Pelita*, 2(2), 188–197. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/pelita/article/view/821>
- Nurchayanto, H. (2020). *Peningkatan Pelayanan Publik*. Penerbit Fastindo.
- Papua, B. P. (2023). *Profil Perumahan Provinsi Papua 2018-2022*. <https://Papua.Bps.Go.Id/Id/Publication/2023/07/10/26b103a4a39c8b14d9b09608/profil-perumahan-provinsi-papua-2018-2022.html>
- Papua, D. (2023). *Validasi Data Program Tuberkulosis Se-Kabupaten Biak Numfor dan*

- Supiori Tahun 2023. <https://dinkes.papua.go.id/validasi-data-program-tuberkulosis-se-kabupaten-biak-numfor-dan-supiori-tahun-2023/>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., & Perangin-angin, M. A. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahman, F., Nurdin, N., & Asropi, A. (2023). Implementasi Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Program Hunian Terjangkau Tanpa Uang Muka di DKI Jakarta. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 5(1), 71–84.
- Rizki, D. A., Wulandari, A., & Chairunnisa, C. (2022). Analisis Kualitas Lingkungan Perumahan Berdasarkan Karakteristik Perumahan Di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya. *Jelast : Jurnal Teknik Kelautan , Pwk , Sipil, Dan Tambang*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26418/Jelast.V9i1.52348>
- Silvy, F. A., Sukristyanto, A., & Basyar, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalur Luar Lingkar Barat Di Kota Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(5), 166–177. <https://doi.org/10.69957/Praob.V4i05.1644>
- Siregar, R. T., Enas, U., Putri, D. E., & Hasb, I. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Sunarti. (2019). *Perumahan dan Permukiman*. Undip Press.
- Suryani, E. T. P., Wilujeng, A., Zakaria, R. F., Supriyanto, A., & Imbalan. (2020). *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, dan Triangulas*. LP2M UM.
- Tachjan. (2006). *Karena itu, Grindle (1980) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar yang acapkali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni: (1) ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja horisontal yang tidak sinergis; dan (3)*. AIPI Bandung.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik*. Suluh Media.